

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis tentang analisis penilaian masyarakat terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ditinjau menurut Fiqh Siyasa, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggapan masyarakat terhadap kinerja DPRD kabupaten Indragiri Hulu asal Rengat Barat bahwa masyarakat sedikit kecewa dengan kinerja DPRD karena banyak aspirasi masyarakat yang tidak terealisasikan oleh anggota DPRD, meski ada aspirasi masyarakat yang terlaksana dengan baik namun masyarakat kecewa karena anggota DPRD tidak dapat melakukan reses ke seluruh desa di kecamatan Rengat Barat. Meskipun demikian, dari hasil wawancara dengan beberapa kepala desa dan perangkat desa lainnya menyatakan pendapat mereka bahwa aspirasi masyarakat ada yang terpenuhi meski tidak sepenuhnya terpenuhidan tentu kebijaksanaan kinerja DPRD sesuai dengan peraturan pemerintah dan Undang-undang, juga sesuai dengan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. masyarakat juga sangat antusias dan menyambut baik serta mendukung kinerja DPRD Kabupaten Indragiri Hulu asal Rengat Barat. Dalam ketentuan pasal 22 ayat (3) dan pasal 29 (1) Undang-undang No.5 Tahun 1974, secara ringkas DPRD mempunyai dua fungsi yaitu: (1) Sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Sebagai Pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan Daerah yang di jalankan oleh Kepala Daerah.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap kinerja DPRD kabupaten Indragiri Hulu asal Rengat Barat adalah Para ahli fiqih siyasah menyebutkan pentingnya pelembagaan *syura* (setingkat dengan pemerintah). Analisis fiqih siyasah tentang kinerja DPRD, bahwa kemaslahatan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dengan jalan musyawarah. Para ahli fiqih siyasah memandang bahwa musyawarah dapat di lakukan dengan masyarakat yang memiliki potensi berpikir kritis dan tajam. Oleh karena itu masyarakat yang awam dapat menyampaikan aspirasinya lewat keputusan Kepala Desa yang akan menyampaikan kepada anggota DPRD dalam rapat terbuka dan di adakannya reses oleh anggota DPRD di Kecamatan karena anggota DPRD tidak mencapai reses ke seluruh bagian Desa di Kecamatan Rengat Barat, dan juga banyaknya permasalahan yang harus di selesaikan oleh anggota DPRD demi tercapainya aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan pemerintah atau Undang-undang.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis terhadap penilaian masyarakat terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditinjau menurut fiqh siyasah, maka penulis menemukan catatan untuk langkah yang lebih baik kedepannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Saran penulis untuk anggota DPRD kedepan hendaknya menampung lebih banyak aspirasi masyarakat dan dapat menjangkau seluruh lapisan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat di desa-desa, untuk dapat mendengarkan keresahan dan keinginan masyarakat yang belum dapat tersampaikan.

2. Perlu ada perbaikan dan peningkatan kinerja anggota DPRD agar maksimal dan berjalan lebih baik sehingga masyarakat merasakan kerja nyata dari usaha tersebut.
3. Selanjutnya anggota DPRD hendaknya mudah berbaur sehingga tidak ada jarak dengan masyarakat, akrab kepada masyarakat, dan memperbaiki citra diri dengan cara yang positif agar hubungan kinerja DPRD tetap terjaga baik di mata masyarakat.
4. Anggota DPRD harus memiliki pengetahuan yang luas dan dalam mengenai ilmu pemerintahan, baik dalam keterampilan kecakapan. Anggota DPRD harus memiliki pandangan dan cara berpikir yang kritis dan tajam. karena itu sangat diperlukan latihan dan pendidikan yang lebih baik guna tercapainya ketatanegaraan yang berdasarkan islam. Sebab agama islam mengatur kehidupan dengan sangat baik juga dalam bidang politik.